

**PERGERAKAN WARGA AKAR RUMPUT MELALUI JALUR  
KEPENGURUSAN PAC PDI PERJUANGAN DALAM MENDUKUNG  
IMAM PRIYONO & ACHMAD FADILI**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kecamatan Gondokusuman,  
Kota Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**TITUS TITIT**

**Nomor Mhs:10522374**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
(STPMD) "APMD" YOGYAKARTA**

**2017**



**PERGERAKAN WARGA AKAR RUMPUT MELALUI JALUR  
KEPENGURUSAN PAC PDI PERJUANGAN DALAM MENDUKUNG  
IMAM PRIYONO & ACHMAD FADILI**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kecamatan Gondokusuman, Kota  
Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Menyelesaikan Studi Jenjang  
Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

**TITUS TITIT**

**Nomor Mhs:10522374**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
(STPMD) “APMD” YOGYAKARTA**

**2017**

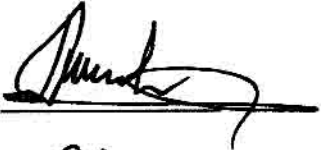




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta

Pada hari :Senin  
Tanggal :28 Agustus 2017  
Jam :13.00  
Tempat :Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD”  
Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tandatangan
1. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> <b>Ketua Pembimbing</b>	
2. <u>Gregorius Sahdan, S.IP.,MA</u> <b>Penguji Samping I</b>	
3. <u>Dra. Herawati, MPA</u> <b>Penguji Samping II</b>	

Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan  
  
Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
(STPMD) “APMD” YOGYAKARTA**

2017

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

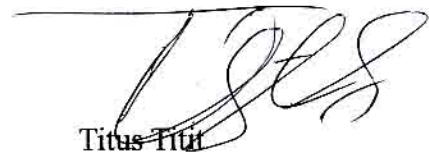
Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Titus Titit  
No. Mhs : 10522374  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini dalah hasil karya sediri, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Agustus 2017



Titus Titit

## MOTTO

“MENEROBOS AKARNYA SEBAB, BERCABAG LIDAH”

“BERAKAR & BERCABANG DAPAT MENSUPPORT”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Tuhan Allah Bapa Yang Maha Pemurah & Pengasih atas Kesetiannya dalam Melindungi dan Menyertai Saya pada setiap aktifitas yang dilakukan. Terimakasih Tuhan atas hidup yang diberikan kepada Saya selama ini, dan Saya tidak tercela sedikit pun, serta terhidar dari kehidupan tersesat duniawi.
2. Mama, Kaka, Adik serta semua keluarga yang membantu biaya selama tempuh pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan dilembaga Perguruan Tinggi STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Semua bentuk batuan baik moril maupun materil.
4. Terimakasih Tuhan atas hidup yang diberikan kepada Saya selama ini, dan Saya tidak tercela sedikit pun, serta terhidar dari kehidupan tersesat duniawi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Maha Esa. Karena atas berkat dan karuianya yang dilimpahkan kepada saya dan diberikan pula petunjuk kesehatan, sehigga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna mencapai Gelar Sarjana jenjang strata satu dalam ilmu pemerintahan Yang

di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.

Secara suptansial skripsi ini bertujuan untuk membangun dukungan yakni pergerakan warga akar melalui jalur kepengurusan PAC Kecamatan Godokusuman dalam memberikan dukungan terhadap Imam Priyono-Achmad Fadli. Majunya Calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta dalam Pilkada serentak tahun 2017. Penulis sangat menyadari bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangan, baik pengalaman maupun pengetahuan serta wawasan berpikir, yang kurang sehingga terdapat berbagai kelemahan. Oleh kartena itu diharapkan segala bentuk saran serta koreksi semua pihak demi penyempurnaan lebih lanjut!.

Banyak pihak yang telah membantu penulisan hingga berhasil menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta. Untuk dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.sos, M.Si, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs Sumarjono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, nasehat dalam penyelesaian skripsi saya.
4. Para dosen dan staf karyawan/karyawati di lingkungan Program Studi Ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Danang Sujatmoko, selaku Ketua DPC sekaligus Anggota DPRD Fraksi PDI-P Kota Yogyakarta yang membantu biaya Prin Skripsi.
6. Bapak Endro Sulaksono, selaku ketua PAC serta semua pengurus PAC, Ranting dan Anak Ranting Kecamatan Godokusuman, Kota Yogyakarta, Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat dimana sebagai objek penelitian skripsi.
7. Tim/Dosen Penguji yang telah membantu Koreksi dan Revisi skripsi.
8. Warga Akar Rumput Kecamatan Gondokusuman, serta seluruh warga akar rumput kecamatan lainnya, di kota Yogyakarta yang berpartisipasi dalam memberikan penjelasan.
9. Segenap sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. Saya menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya, untuk itu saya mohon kritik saran yang bersifat memberikan motivasi.
10. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat



berguna bagi semua pihak yang memerlukannya. Berkat  
Tuhan bagi kita semua

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>SINOPSIS.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
D.1. Pilkada.....	9
1.1. Azas-azas Pilkada.....	10
1.2. Tahapan Pilkada.....	11
1.3. Sistem Pilkada Serentak Indonesia.....	12
E. Penetapan Organisasi Tim Sukses yang Efektif dan Efesien.....	14
F. Kampanye dan Kinerja Mesin Parpol dalam Pilkada.....	16
G. Partai Politik.....	20
1. Definisi Partai Politik.....	21
2. Ciri-ciri Partai Politik.....	24
3. Fungsi Partai Politik.....	25
3.1. Fungsi Artikulasi Kepentingan.....	28
3.2. Fungsi Agregasi Kepentingan.....	29
3.3. Fungsi Sosialisasi Politik.....	29
3.4. Fungsi Rekrutmen Politik.....	30

3.5. Fungsi Komunikasi Politik.....	30
H. Ruang Lingkup Penelitian.....	35
I. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Uunit Analisis.....	36
3. Sumber Data.....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB. II. SETING LAPANGAN.....</b>	<b>42</b>
A. Monografi Kecamatan Gondokusuman.....	42
1. Kelurahan Demangan.....	42
2. Kelurahan Kota Baru.....	43
3. Kelurahan Klitren.....	43
4. Kelurahan Baciro.....	44
5. Kelurahan Terban.....	44
6. Batas Wilayah.....	45
7. Luas Wilayah.....	46
8. Jumlah Penduduk.....	46
9. Wilayah Atministratif dan Data Lembaga.....	46
10. Mata Pencaharian Penduduk.....	46
11. Kadaan Penduduk Menurut Agama.....	47
12. Keadaan Sosial Budaya.....	48
13. Kondisi Kesejahtraan Penduduk.....	49
B. PAC (Pimpinan Anak Cabang) Kecamatan Gondokusuman.....	49
1. Cabang dan Ranting.....	49
2. Kepengurusan PAC Kecamatan Gondokusuman.....	51
3. Nama Pengurus Ranting dan Anak Ranting.....	53
C. Sosialisasi .....	54
1. Visi dan Misi.....	55
1.1. Visi.....	55
1.2. Misi/Sapta Aksi Perubahan.....	61

D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.....	63
1. Anggaran Dasar.....	63
2. Anggaran Rumah Tangga.....	68
<b>BAB. III. ANALISIS DATA.....</b>	<b>72</b>
A. Kampanye.....	72
A.1. Kampanye Langsung Warga Akar Rumput.....	74
B. Suara Warga Akar Rumput.....	81
C. Permasalahan yang Ditemukan dalam Lapangan.....	93
D. Koalisi.....	94
D.1. PDI Perjuangan Koalisi Nasdem.....	94
E. Tim Sukses.....	95
E.1. Dukungan PAC PDI Perjuangan.....	96
G. Hasil Hitung TPS (From C1) Kota Yogyakarta.....	97
H. Sertifikat Rekapitulasi.....	99
<b>BAB. IV. PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
Kesimpulan dan Saran.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

## SINOPSIS

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara serentak pada Tahun 2017. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada serentak adalah sesuatu yang baru belum tentu semua orang tau. Apalagi Warga akar rumput. Untuk itu Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pergerakan Warga Akar Rumput melalui jalur Kepengurusan PAC PDI Perjuangan dalam memberikan dukungan terhadap Imam Priyono-Achmad Fadli (Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017, Kecamatan Gondokusuman). Metode Penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan tentang Pergerakan Warga Akar Rumput melalui sosialisasi, kampanye, dan koalisi.

Sesui hasil temuan-temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dalam Pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi begitu banyak ditemukan masalah. Masalah yang ditemukan dalam lapangan pada saat berlangsungnya pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi yakni: Pertama, tidak ketersediaan data base kepengurusan PAC Kecamatan, ketika pada saat dilakukan pendataan kepengurusan Cabang, Rating dan Anak Rating PAC. Kedua, tidak adanya kantor yang dibangun di tingkat wilayah kecamatan dan kelurahan hal tersebut mempersulit peneliti untuk perolehan data yang sah, akurat dan banyak, tidak ada kantor yang dibangun di wilayah kecamatan dan kelurahan mengakibatkan tidak dilakukan proses rekrutmen, kaderisasi dan seleksi untuk menarik dan memilih bibit pengurus. pada saat berlangsungnya Pilkada serentak walikota Yogyakarta 2017 tidak bekerja secara maksimal mesin partai karena keterbatasan pengurus. ketiga, tidak digaji oleh anggota pengurus atau tidak ada gaji tetap. Pada saat ditanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART bilang kami tidak punya. Keempat, tidak ada lingkup internal dan tidak ada aturan yang mengikat ketika pada saat ditanya anggota pengurusnya tentang peran dan fungsinya tidak menjelaskan peran dan fungsinya semua menjadi tanggungjawab ketua DPC, Janjian ketemu disembarang tempat, merasa tidak penting pada saat ketemu dan wawancara yang berkaitan dengan kepengurusan yang mereka embani. tidak ada pembagunan di lingkup internal kepegurusan.

Sosialisasi yang dilakukan adalah menyuarakan tentang visi/misi Kota Yogyakarta beserta pasangan calon walikota dan wakil walikota. dalam sosialisasi tersebut memuat visi/misi/aksi nyata perubahan dalam Kota Yogyakarta.

Kampaye yang dilakukan oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bpk. Imam Priyono dan Bpk. Achmad Fadli bersama tim sukses/pedukug yakni ada dua bentuk kampanye pertama, kampanye secara langsung atau tersentuh secara langsung kepada warga akar rumput. Dan kedua, kampanye secara tidak langsung atau tidak tersentuh. Kampaye secara langsung atau tersentuh adalah Pertama, Kampanye Langsung ke warga Akar Rumput dengan cara masuk ke Daerah Basis Pemilih, menggelar Pertemuan dengan warga, berkunjung door to door atau dari Rumah ke Rumah, mengadakan Diskusi dengan warga dan sebagainya. Kunjungan Keakar Rumput akan memunculkan pandangan bahwa Sang Kandidat “Lebih Dekat” dengan Warga. secara keseluruhan

diwilayah PAC PDI Perjuangan Kec Gondokusuman sudah melakukan Pergerakan Kampanye secara intensif, meski pergerakan mesin partai belum secara maksimal bergerak. Kampanye tersebut dengan medatangkan basis dukungan di tingkat RW.

Pergerakan warga akar rumput melalui Koalisi. PDI Perjuangan koalisi Nasdem terlihat dari Pernyataan surat rekomendasi dukungan, surat pencalonan, surat keputusan Pimpinan partai, surat pernyataan kesepakatan, serta surat Pernyataan kesesuaian Naskah terhadap Bpk. Imam Priyono dan Bpk. Achmad Fadli untuk maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak 2017 Kota Yogyakarta. PDI Perjuangan koalisi Nasdem terlihat dari saling Berkoordinasi dan kerjasama dalam membangun rumah informasi dan mengefektifkan Posko disetiap titik Kota Yogyakarta untuk mengalang basis dukungan. Mengadakan Rapat Koordinasi, bekerja sama dengan Team seblas laskar ganas dan satgas, melakukan pelatihan dan pemantapan saksi, serta menjalankan kampanye dan sosialisasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Revormasi yakni untuk mewujudkan Suatu Indonesia Baru, tersebut tercapai dengan mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat. Selama Masa Orde Baru dan Revormasi saat ini Kedaulatan Sepenuhnya berada di tangan Lembaga-lembaga Eksekutif dan Lembaga-Lembaga Legislatif. pada zaman Revormasi saat ini Kedaulatan berada ditangan Partai Politik. Partai Politik melalui Fraksi-fraksinya di MPR dan DPR, dapat melakukan apapun yang berkaitan dengan kepentingan Bangsa dan Negara, bahkan dapat memperhatikan Presiden sebelum masa Jabatannya, seperti layaknya Negara-negara dalam Sistem Parlemerter padahal Negara Indonesia adalah Negara yang Menganut Sistem Presidentil.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Politik ,tersebut antara lain disebabkan oleh Sistem Pemilu yang kita anut di masa lalu, yakni Sistem Proporsional. Dalam sistem ini para pemilih hanya memilih tanda gambar Partai Politik tertentu. selanjutnya Partai Politiklah yang akan menentukan siapa-siapa yang akan duduk sbagai wakil rakyat (Wakil Partai Politik) di DPR atau DPRD. Akibatnya Anggota Dewan lebih merasakan dirinya sbagai Wakil Rakyat, sehingga mereka lebih banyak berbuat untuk kepentingan Partai daripada kepentingan Rakyat. Dalam Sistem ini seseorang yang tidak disukai dan tidak didukung oleh Rakyat Pemilih, Sepanjang yang bersangkutan masih disukai oleh Pimpinan Partainya, keberadaan Didewan akan selalu terjamin.

Salah satu hak Politik yang dimiliki oleh Rakyat yakni hak memberikan Suara pada saat Pemilu berlangsung digelar. sesudah itu semua hak Politik yang dimiliki oleh Rakyat beralik Kepartai Politik sehingga Rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan dapat dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat, Sistem Pemilu harus dirubah, dengan Sistem yang memberikan peluang terhadap Masyarakat Pemilih, untuk dapat menggunakan hak Pilihnya secara Langsung. Melalui Amandemen Undang-undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dengan menambahkan Pasal 6A Dan Pasal 22E. Sistem Pemilu dirubah menjadi Pemilu Secara Langsung, baik untuk Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Daerah merupakan bagian yang tidak bisa dapat dipisahkan dari NKRI, dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seharusnya nyambung dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pemilihan secara Langsung. di samping alasan tersebut diatas, ada berapa alasan lain, yang mengharuskan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung, yakni mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat, Warga Masyarakat Didaerah merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari warga Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas Kedaulatan yang merupakan Hak Asasi mereka, yang telah dijamin oleh Konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945. oleh karena itu, Warga Masyarakat Didaerah, berdasarkan Kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan Daerahnya Masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD, Anggota DPRD Dipilih langsung oleh Rakyat pemilih melalui Sistem Proporsional dengan daftar Calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, bukan dipilih Langsung oleh Rakyat, tingkat Legitimasi Anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat Legitimasi yang dimiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD, karena Kepala Daerah dan DPRD Dipilih Serentak oleh Masyarakat sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 2015 Sebagaimana terjadi perubahan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selama Pemilihan Langsung Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah begitu banyak mengintai dari sudut pandang persoalan, sehingga Pilkada Langsung yang selama ini digelar menjadi carut-marut dan tak kunjung



terselesaikan. Banyak manipulasi data, pembatalan pada saat berlangsungnya Penyelenggaraan Pilkada. Begitu banyaknya sengketa dan konflik dalam Pilkada. Dan yang kalah pentingnya yakni Politik Uang yang selalu mencuat pada saat Pilkada berlangsung digelar.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada Serentak sebagai bentuk menguji kematangan Demokrasi. sebagaimana terjadi perubahan pada Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pilkada menjadi Undang-undang No.10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada Serentak.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada. Untuk menjamin Pilkada yang Demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 (4) UUD 1945 maka Kedaulatan Rakyat serta Demokrasi dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat Wajib Dihormati sebagai syarat utama Pelaksanaan Pilkada.

Pemilihan Walikota Yogyakarta pada 2006 lalu telah diguncang Gempa Politik yang sangat dahyat mebuat Lembaga Penyelenggara Pilkada sebagai Lembaga Independen yakni KPUD hampir tidak mampu untuk mengatasi. KPUD Kota Yogyakarta akhirnya bekerja sama dengan Direktur Program Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM berhasil dapat Menyelenggarakan Pilkada Kota Yogyakarta. Pemilihan Walikota Jogja pada 2011 lalu semakin tinggi Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak Pilihnya, terkesan adanya Masyarakat Politik. Pemilihan Walikota Jogja 2017 ini meningkatkan Partisipasi Masyarakat. terlihat dari adanya suhu Politiknya yang semakin tinggi pula.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) yakni Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati, Walikota dan Calon Wakil Walikota ( seyongngnya sama dengan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Dan DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 sebagaimana terjadi perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak (Pilkada Serentak). dalam Undang-

undang tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah perlu menjaga Keutuhan Harkat, Martabat, Kewibawaan, dan Kesetaraan dalam Masyarakat sebagai sumber Kekuasaan yang menjadi perebutan dalam Pilkada. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi sebagai Mana dimaksud dalam hiruf a, perlu ditegaskan dalam pelaksanaan Pilkada Secara Langsung oleh Rakyat, dengan tetap melakukan berapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan Pemilihan Langsung yang selama ini dijalankan.

Paca Reformasi, Pilkada menjadi Kajian yang tak pernah surut dalam pembicaraan sebagai konteks Penyelenggaraan Negara. Berapa hal yang menjadikan Pilkada sangat penting untuk dikaji adalah pertama, bagaimana proses Pilkada itu dilaksanakan melali penerapan Nilai-nilai Demokratis. Harpannya agar Kekuasaan yang Dipegang juga mempunyai Legitimasi yang kuat dan Keapsahannya (Kepala Daerah) menjadi cermin sebuah Kedaulatan. Pilkada sarat agar Nilai-Nilai Demokrasi bisa tumbuh sekaligus sisi positif dari Perkembangan Demokrasi Akar Rumput (grassroot), dihadapan dengan kemunculan isu-isu minor terhadap pembagian Kekuasaan. Misalnya tumbuhnya Asosiasi-asosiasi dalam Masyarakat hadir sebagai instrumen Politik yang ditunggangi oleh Elit Politik. Yang semuanya itu sebagai “pacuan kuda” bagi Elit Politik yang hanya bertujuan memperjuangkan aspirasi sekelompok Masyarakat.

Pergerakan warga akar rumput melalui Jalur Kepengurusan PAC PDI Perjuangan merupakan hal yang lumrah diakui sebab warga akar rumput yang dimaksud adalah warga yang belum terorganisir kedalam Partai Politik. Warga akar rumput tersebut pada saat berlngsungny Pilkada mereka mebentuk kelompok Pendukung yang akan Mendukung Calon yang Maju dalam Pilkada. Namun, sayangnya kelompok Pendukung tersebut sama dengan masa. Masa cuma sekedar dan kemudian Menghilang, tanpa menetap dalam sebuah ruang dan waktu. Oleh sebab itu kelompok pendukung atau warga akar rumput tersebut perlu diorganisir kedalam Partai Politik. Warga akar rumput tersebut terdiri dari Nelayan, Petani, Peternak, Padangang, serta Komunitas-komunitas dll. Apalagi Pilkada sebagai bentuk kekuatan yang masuk untuk pecah memecah kelompok

tersebut, tanpa pandang sistem nilai dan norma yang mengakar dalam warga akar rumput tersebut. Dalam Tim Sukses yang dibentuk calon kepala daerah yang maju dalam pilkada, didalam tim tersebut adanya orang-orang yang kelas Atas yang tidak pandang bulu, ketika bekerja pada saat berlangsungnya pesta demokrasi digelar (Pilkada). Hal inilah yang perlu, agar kelompok tersebut bisa terorganisir kedalam partai yang sudah membangun akar demokrasi yang sangat kokoh dalam hal PDI-P. Sebab partai seperti inilah yang akan paham dan akui Tentang sistem Nilai dan Norma yang mengendap dan berakar dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut dapat memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju dalam pilkada, Namun, sayangnya apa sih tuntutan mereka yang disampaikan pada saat berlangsungnya pesta demokrasi (Plkada) digelar. dan akan menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan? dan Siapa yang menjadi Perwakilan mereka untuk bersama dengan Pemerintahan dalam menyusun kebijakan? apabila Calon Kepala Daerah akan menang atau kalah terpilih nanti. Apakah kelompok tersebut sudah punya utusan didalamnya? tentu tidak dan harus melalui partai politik. Sebab partai politik sudah mempunyai orang yang ada dan bersama dalam pemerintah untuk dapat merumuskan kebijakan. Secara otomatis Kebijakan dan aturan yang dibuat tentu akan lebih menegakan nilai dan Norma yang berakar dalam kelompok warga akar rumput tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Partai yang sudah Membangun Akar Demokrasi yang sangat Kokoh. Sistem Kepengurusan Partai PDI Perjuangan menggunakan Cabang-Cabang dan Ranting-ranting sebagai unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antara Pengurus dan Partai, yang sekaligus berfungsi melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi. Partai PDI-P dapat membentuk Pengurus di tingkat Wilayah Kecamatan yang selanjutnya diberi nama masing-masing PAC, Anak Ranting, dan Satgas. PAC yaitu Pimpinan Anak Cabang Tingkat Kecamatan, Anak Ranting yang tersebar diseluruh perkampungan dan kelurahan hingga ke tingkat paling bawah Rt/Rw dan Satgas yang tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan.

Terlihat dari pembentukan Kepengurusannya sampai ketingkat Akar Rumpuk. PAC PDI Perjuangan juga dapat membentuk anggota yang secara tidak langsung seperti Relawan dll. Partai Pada umumnya terkesan selama ini tidak berkembang dan tertinggal jauh dalam Perkembangan Modernisasi, untuk itu Partai Politik dituntut harus membuat suatu Perubahan, tentu dengan menciptakan Inovasi. salah satu bentuk perubahan tersebut yang dilakukan adalah melalui Pilkada Serentak yang akan dapat menciptakan Inovasinya. Langkah kongkret yang dilakukan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gondokusuman dalam membuat inovasi melalui Pilwali (pemilihan walikota dan Wakil Walikota Yogya Pa Imam Priyono-Achmd Fadili adalah dengan pergerakan warga akar rumput melalui jalur Kepengurusan PAC. Dalam Pilkada Serentak 2017; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kota Yogyakarta, terdapat adanya dua calon yang maju, yakni Imam Priyono- Achmad Fadili dan Haryati Syuti-Hore; Imam Priyono-Achmad Fadili mendapatkan dukungan mutlak dari PDI-Perjuangan, dan Partai Nasdem sedangkan Pengusungnya yakni, Hanura dan PKB; Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Imam Priyono-Achad Fadili menang di tujuh Kecamatan yang ada dikota Yogyakarta. Tetapi sayangnya kalah dari tujuh (7) Kecamatan lain yang ada di Kota Yogyakarta. Tujuh Kecamatan lain yang ada diwilayah Kota Yogyakarta memenangkan pasangan nomor urut dua yakni Haryati Syuti-Hore yang padanya menang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kota Yogyakarta 217-222. Disini terlihat dengan jelas sangat menonjolnya peta politik yang dibangun kedua Pasangan calon walikota nomor urut 1 dan 2 tersebut dalam pemilihan walikota jogja 2017.

Pengertin Pilkada Serentak: Pilkada Serentak sebagai bentuk dalam menguji kematangan dan membangun Kesetaraan Demokrasi. Kematangan Demokrasi artinya Pilkada Serentak yang diselenggarakan tanpa adanya permasalahan, dan sengketa, kekerasan, konflik dan berbagai permasalahan yang lain yang menghambat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tersebut. sehingga, Pilkada serentak dapat diselenggarakan berjalan dengan mulus. Pengertian Pilkada serentak sesuai Undng-undng Nomor 10 Tahun 2016 adalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Demokratis. Pilkada serentak baru pertama kali diselenggarakan pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 saat ini. Pilkada serentak yang dapat dilaksanakan diseluruh tanah air ini cukup menjadi perhatian yang sangat alot. Salah satu adalah perhatian dari dunia luar. Perhatian dunia luar terhadap pilkada serentak 2015 kemarin seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. dan Pilkada Serentak 2017 yang menjadi perhatian adalah pilkada DKI Jakarta yang berlangsung dua kali putaran. Pilkada serentak 2017 di Kota Yogyakarta dimana KPU Kota Yogyakarta masih menggunakan Kotak Lama Pemilihan Pilipres 2014 lalu. Calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang Maju dalam Pilkada tentu mendapatkan dukungan dari Partai Politik; tetapi kenyataannya pada saat memasuki Pemilihan selalu mengalami Kekalahan. Pesta Demokrasi yang digelar semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pada saat ini, selalu mengalami hal yang namanya menang kalah pada akhir digelarnya Pesta Demokrasi tersebut (Pilkada). Pihak yang kalah merasakan begitu betapa besarnya , biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya Pesta Demokrasi digelar. bagi pihak yang menang merasakan memiliki Kewenangan. Hal ini membuat kita tidak sama sekali petik makna dibalik kekalahan tersebut. Pihak yang kalah merasa dirugikan. Dan belum pernah mendapatkan imbalan ganti rugi untuk biaya yang dikeluarkan. pertandingan sepak bola bagi Tim yang Kalah tetap gajinya Berjalan setiap bulan. Tetapi dalam Pertarungan politik melalui Pilkada, Pemilu, dan Pilipres tidak sama sekali mendapatkan apa-apa.

Warga akar rumput adalah warga tingkat dasar/paling bawah. Dalam demokrasi disebut sebagai akar serabut demokrasi. Kenapa dikatakan akar serabut karena warga tersebut belum terorganisir kedalam partai politik. Warga tersebut terdiri dari Komunitas-komunitas, petani, nelayan, buruh, pedagang, kaum difabelitas, karang taruna, peternak, tokoh perempuan, Ibu-ibu PKK, Rt/Rw, tokoh agama, dll. Melalui Jalur Partai politik sebab, warga akar rumput adalah warga yang berlandaskan kemajemukan atas dasar sara yang mudah sangat rawan terjadinya konflik dan sengketa. Pada saat berlangsungnya Pilkada dilaksanakan.

Begitu banyaknya sengketa dan konflik yang menjadi perhatian diberbagai kalangan termasuk dunia luar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di muka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini yaitu “Bagaimana Pergerakan Warga Akar Rumput melalui jalur Kepengurusan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Godokusuman dalam mendukung Imam Priyono-Achmad Fadili?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk dapat Mengambarkan Sejauhmana pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi

### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan berguna serta dapat memberikan kontribusi terutama untuk pergerakan warga akar rumput melalui sosialisasi, kampanye dan koalisi serta Perkembangan Ilmu Pengetahuan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

Hasil Penelitian ini secara Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan Pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan serta memperkaya Wawasan Kerangka Pemikiran dan Praktek Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota terutama kontribusi Partai Politik dalam menciptakan Pemimpin yang Mengakar

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Elisabeth Sukmato Genewati Wuryandari M. Riza Sihbudi. 1991. *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. PT Grasindo IKAPI, Jakarta
- Achmad Herry, SE. 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses; Dalam Pilkada Lansung*. Galang Press IKAPI, Yogyakarta
- Ali, Fachry dan kholid Novianto. 1997. *Politik Komunikasi Harmoko, Dari Rakyat ke Panggung Politik* Penerbit Intermedia, Jakarta
- Afian, 187. "Melepaskan keterkurungan ideologis" *Wawancara Panji Masyarakat*, Nomor 542
- Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A dan Pasal 22E, *Pemilu Secara Langsung*
- Akbar Tanjung, 2006. *Partai Politik dan system Kepartaian Indoneia atara kenyataan dan harapan*. Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Chin-nig Chu. (tanpa tahun). *Metal baja, Patang Menyerah* Pt. Elex Media Komputido, Jakarta
- DPP PDI, 1987. *Thema Kampaye PDI*, Jakarta
- DPP PDI, 1987. *Thema dan materi kampanye pemilu, (program kampanye) PPP*, Jakarta
- Fatah, Eep saefullah. 2005. *Pilkada: merebut pemilih, "Pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratisasi di Indonesia"* Makalah Seminar Nasional, Batam
- Haboddin, Muhtar. 2008 "Pilkada Dan Kekerasan Politik" Ambon Ekspres
- Iriato, 2008. *Dinamika politik local dan otonomi daerah*, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta

- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mac Andrews. 2000. *Perbandingan system politik*. GMU Press, Yogyakarta
- Mas, oed, Mohtar dan colin Mac Anrews. 2000. *Perbandingan system politik*. GMU Press Yogyakarta
- Nimmo, Dan, 1993. *Komuikasi Politik, Rosdakarya, Bandung*
- Panji Masyarakat*, 1987. Nomor 540, 550 dan 559
- Sahdan, Gregorius (dkk). 2008. *Politik Pilkada-Tantangan Merawat Demokrasi*, IPD Press, Yogyakarta.
- Sahdan, Gregorius dan Haboddin, Muhtar. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. The Indonesia Power Of Democracy (IPD), Anggota IKAPI. Yogyakarta
- Suara Indonesia Baru*, 16 April 1987.
- Suara pembaruan*, 11 dan 13 februari 1988.
- Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016, Sebagaimana Terjadi Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Pilkada*
- Undang-Udang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18Ayat (4).  
*Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Dilaksanakan Secara Demokratis*